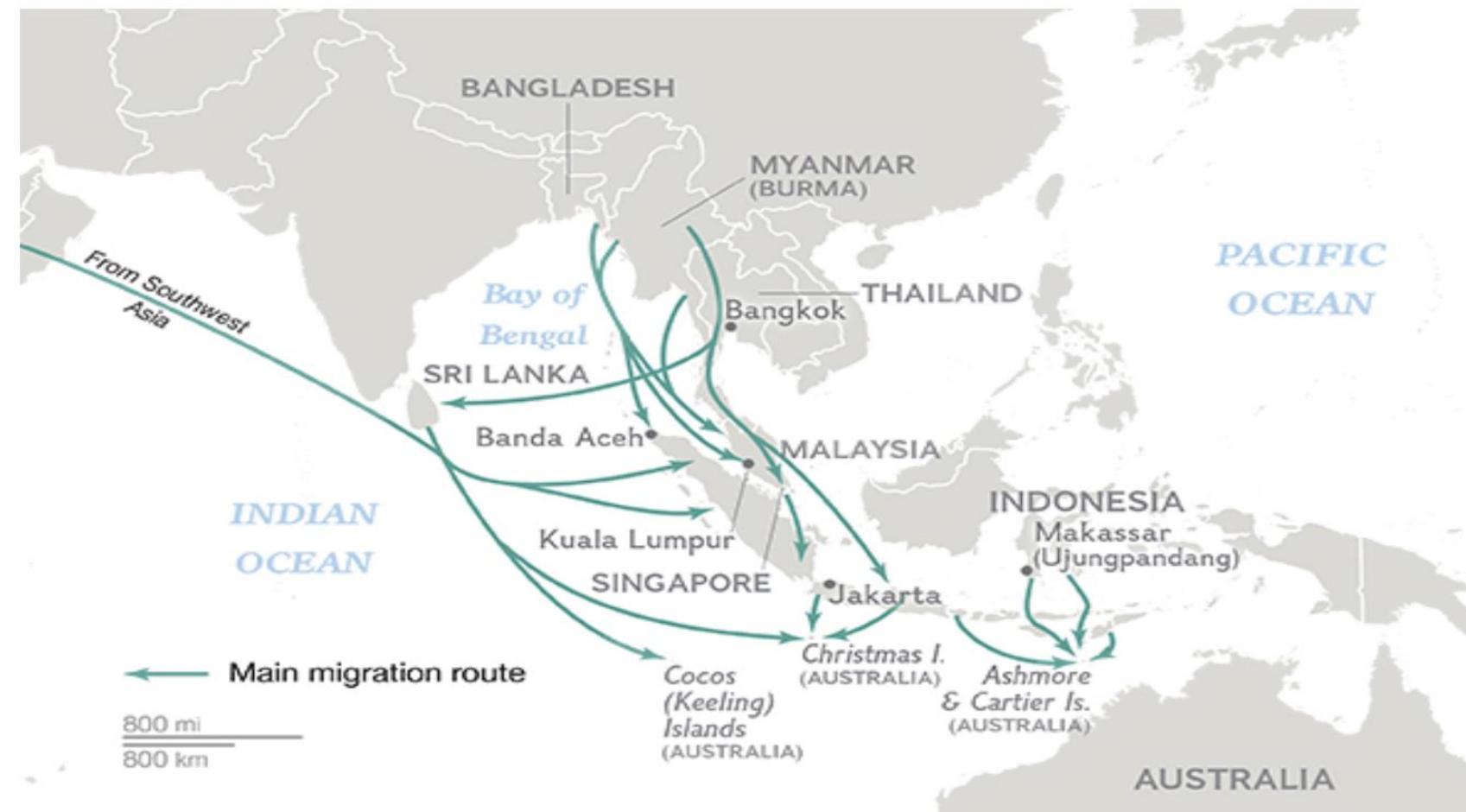




Durable Solution Dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia

Dr. Irawati Handayani, SH., LL.M
Department of International Law, Universitas Padjadjaran

Peta Human Migration di Asia Tenggara



NG STAFF

SOURCE: MISSING MIGRANTS PROJECT, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

Data Jumlah Pengungsi di Indonesia

PEOPLE OF CONCERN
INCREASE IN
1% 2018

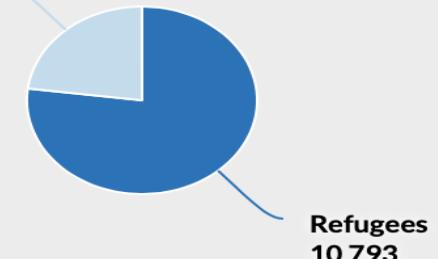
2018 14,016

2017 13,840

2016 14,405



Asylum-seekers
3 223



■ Refugees

■ Asylum-seekers

INDONESIA, TEMPAT TRANSIT PENGUNGSI GLOBAL

LIPUTAN 6
.COM

Sumber Data: UNHCR,
Kemlu RI, Ditjen Imigrasi
Olah Data:
Rizki Akbar Hasan
Grafis: Abdillah
Foto: Liputan6.com

ASAL NEGARA

Afghanistan 7.000 - 8.000	Somalia 1.446	Rohingya/Myanmar 954 - 1.000	Irak 950	Nigeria 752	Sri Lanka 543	Lain-Lain 2.460 - 2.500
-------------------------------------	-------------------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------------

TITIK-TITIK PENGUNGSIAN di INDONESIA



Data Jumlah Pengungsi di Indonesia

INDONESIA

LOCATION



KEY FIGURES

2018 YEAR-END RESULTS

1,070	refugee cases were submitted for resettlement, of which 509 departed
417	people of concern returned voluntarily to their countries of origin

2019 PLANNING FIGURES

500	people of concern will receive life-skills training for livelihoods purposes
400	Resettlement Registration Forms will be submitted
300	households will receive multi-purpose cash grants

Indonesia dan UNHCR

- ▶ Indonesia bukan *state party* dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967
- ▶ Keberadaan UNHCR di Indonesia dimulai pada tahun 1979 dibentuknya MoU antara Indonesia dan UNHCR untuk menangani pengungsi yang berada di Indonesia
- ▶ Proses Penentuan Status Pengungsi (RSD) diserahkan kepada UNHCR, bukan pada Indonesia
- ▶ Sebelum ditetapkannya PP No. 125 tahun 2016, setiap pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah dikategorikan sebagai illegal imigran. PP No. 125 tahun 2016 membawa perubahan baik akan pengakuan seorang pengungsi atau asylum seeker.

Rezim Perlindungan Internasional terhadap Pengungsi

Ps. 14
DUHAM

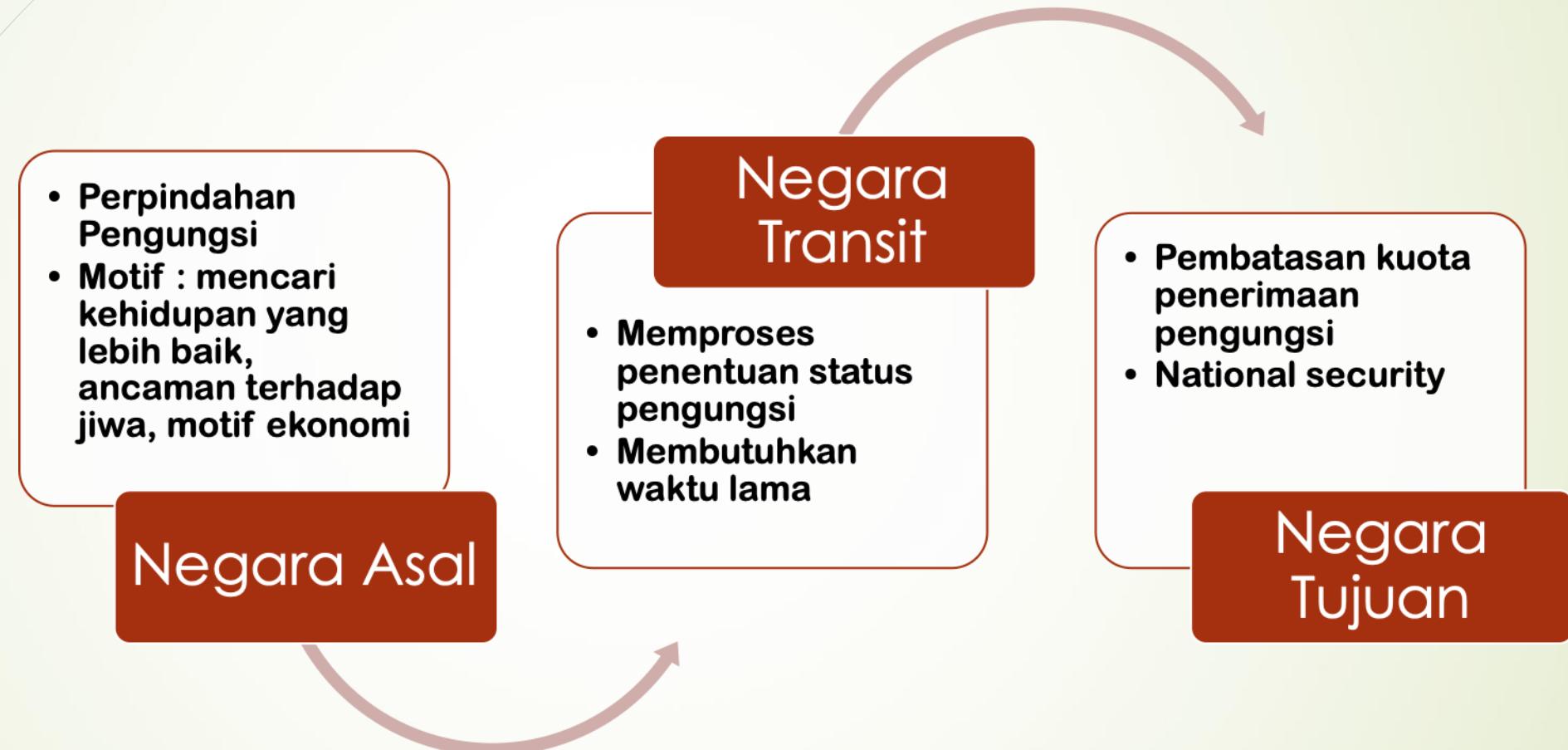
1951
Convention
of the Status
of Refugee

1967
Protocol

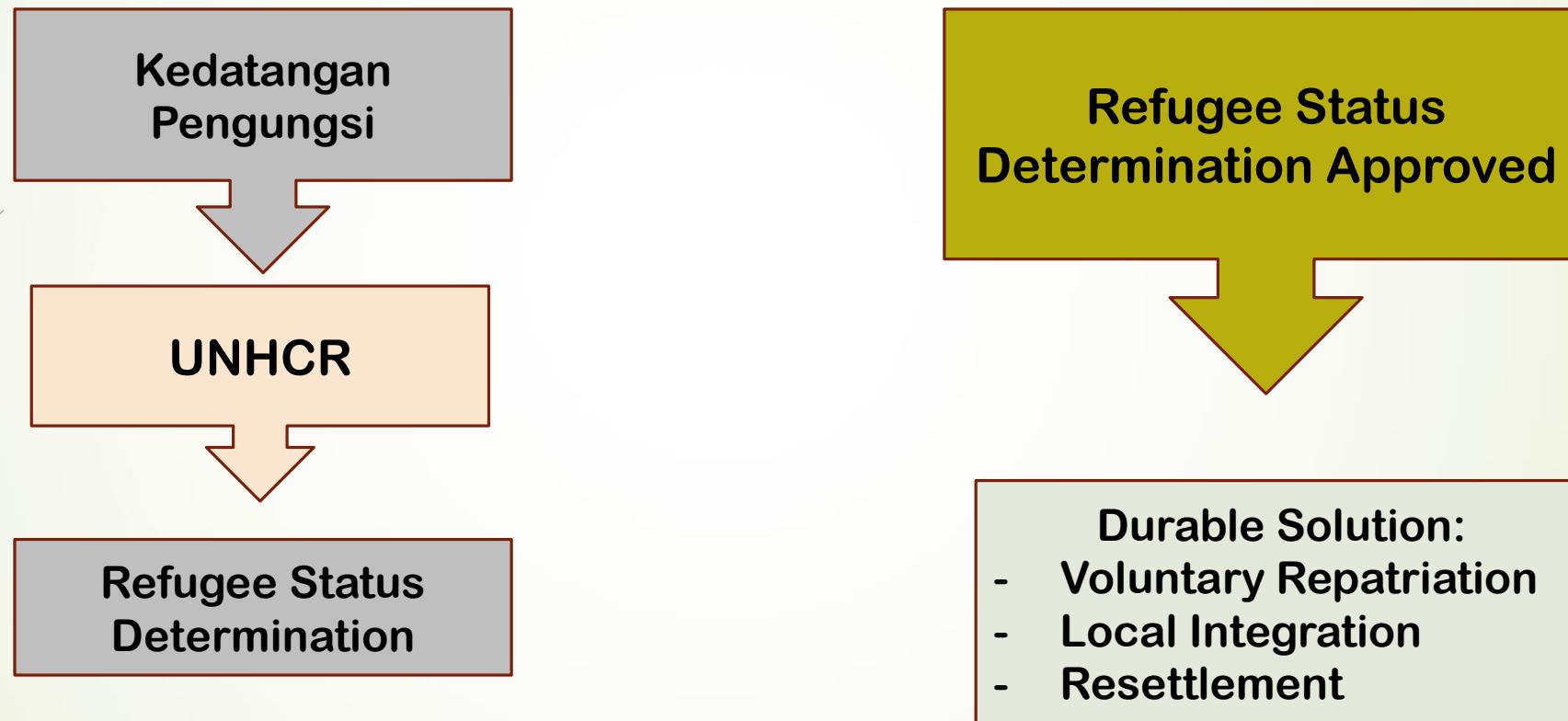
Konvensi
Internasional HAM

Antara lain:
- ICCPR
- CAT
- CERD

ALUR PENGUNGSIAN LINTAS BATAS NEGARA

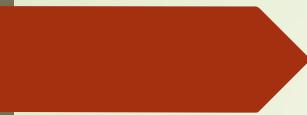


Permasalahan Utama: Resettlement atau RSD?



RSD Process

- ▶ Refugee Status Determination : Proses hukum dan administrative yang dilakukan oleh negara dan UNHCR untuk menentukan apakah seseorang yang mencari perlindungan internasional berhak mendapatkan status pengungsi.
- ▶ Tugas utama RSD sebenarnya ada pada pemerintah, tapi seringkali UNHCR berdasarkan mandatnya melakukan RSD terutama untuk negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951
- ▶ Prinsip utama RSD : Confidentiality



Criteria Penentuan Status Pengungsi

1. Outside country of nationality/former habitual residence
2. Well-founded fear
3. Persecution
4. Reasons (race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion)
5. Unable or unwilling, for fear of persecution, to seek that country's protection or to return there

Proses Refugee Status Determination

► Hambatan dalam Proses RSD

- Proses di lakukan oleh UNHCR dengan jumlah staf yang terbatas
- Jumlah aplikan yang banyak
- Prosesnya yang lama
- Individual case by case
- Technical matters dalam proses RSD

Praktik Proses RSD : Praktik Regional dan Praktik Negara

Common European Asylum System (CEAS)

Standarisasi perlindungan pengungsi melalui usaha kolaboratif yang bertujuan mengharmonisasi standar minimum bersama

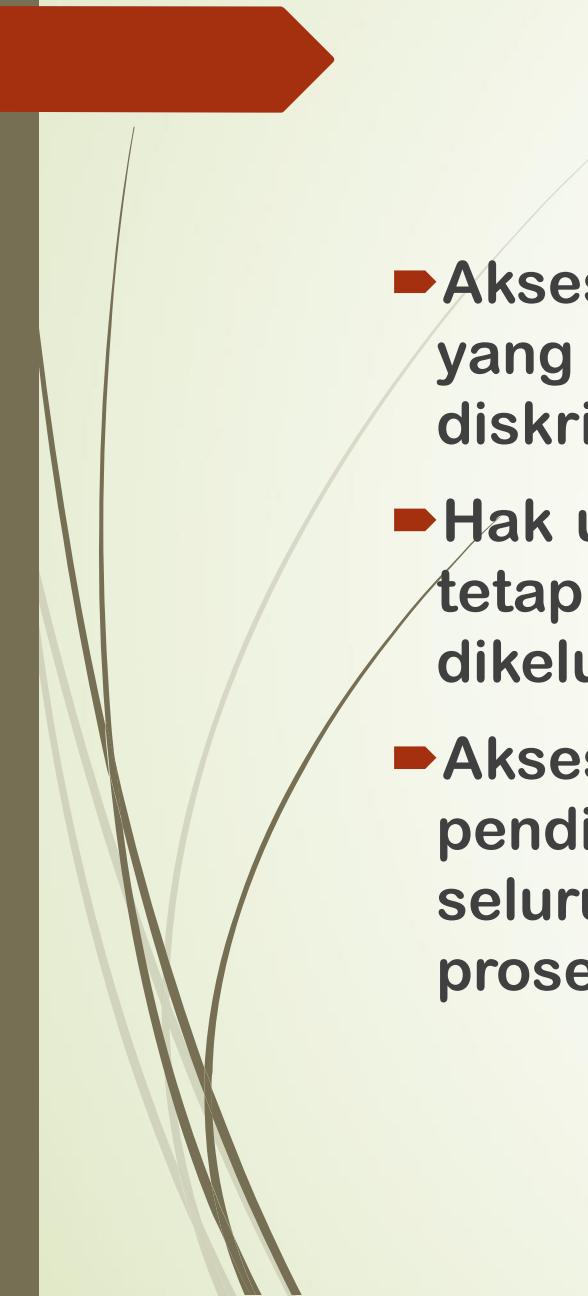
Dublin Regulation

Temporary Protection

National Initiatives (Thailand)

National Screening Mechanism

- 10 Januari 2017, pemerintah Thailand mengadopsi Resolusi Kabinet 10/01, BE 2560 → menyerukan pembentukan Komite untuk menerapkan mekanisme Screening dan mengatur populasi pengungsi di Thailand.
- Insititusi yang ditugaskan membentuk Screening Mechanism adalag Kepolisian dengan bekerja sama dengan Kemenlu, Kementrian Tenaga Kerja, National Security Council dan beberapa badan yang relevan.
- Juni 2018, organisasi-organisasi yang bergerak untuk perlindungan pengungsi mengusulkan penetapan peraturan oleh pemerintah Thailand yang menjamin:
 - Perlindungan dari pemulangan ke wilayah asal pengungsi
 - Mengakui standar internasional perlindungan pengungsi

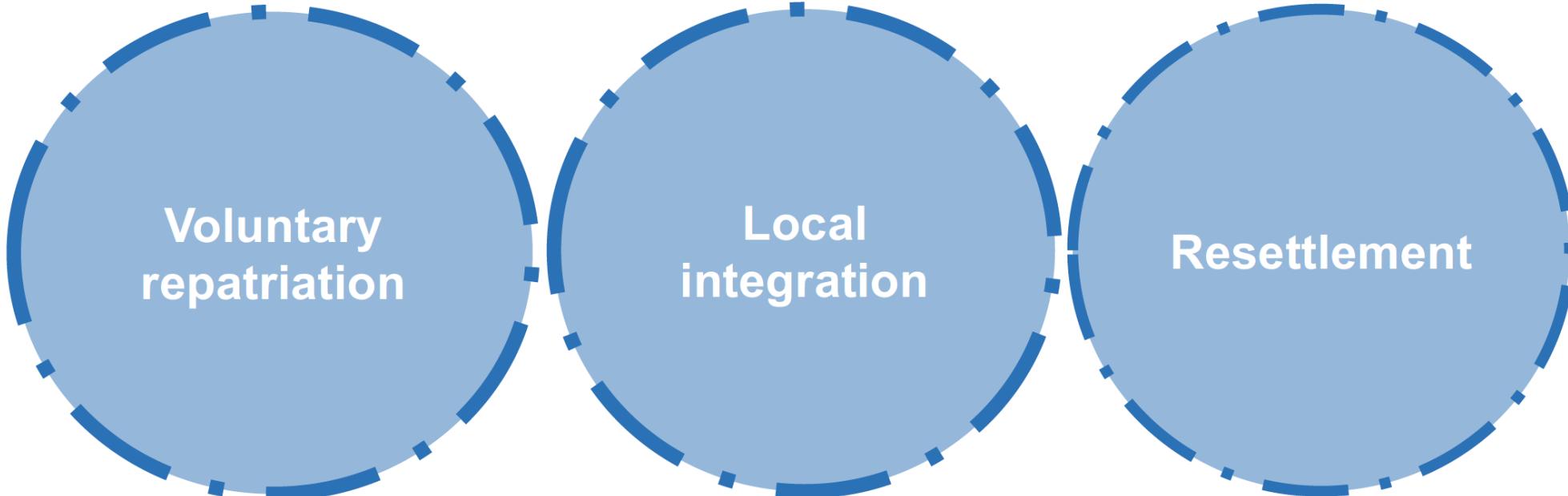
- 
- ▶ Akses pada prosedur yang efisien dan fair untuk semua individu yang mencari status pengungsi sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan perlindungan yang sama di hadapan hukum
 - ▶ Hak untuk mendapatkan proses yang independen dan hak untuk tetap berada di Thailand hingga putusan status pengungsinya dikeluarkan
 - ▶ Akses terhadap dokumen-dokumen hukum, akses kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja serta bantuan lainnya untuk seluruh pengungsi dan pencari suaka yang masih menunggu proses screening.

National Initiatives (Thailand)

- ▶ Thailand bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 → tidak mempunyai pengaturan khusus tentang Pengungsi → refugee & asylum seeker dikategorikan sebagai Illegal Immigrant
- ▶ 24 Desember 2019 Kabinet Thailand menyetujui pembentukan Screening Mechanism untuk membedakan orang-orang yang membutuhkan *International Protection* dengan *Economic Migrant*
- ▶ *Screening Mechanism* diterapkan dengan memperhatikan standar internasional perlindungan pengungsi.



Three traditional solutions



Voluntary
repatriation

Local
integration

Resettlement



Voluntary repatriation

- Voluntariness
- Safety
 - Physical
 - Legal
 - Material
- Dignity

Local Integration

- Refugees locally integrating into the country of asylum
- Two-way process
- Dimensions
 - Legal
 - Economic
 - Social and cultural



Global
Learning and
Development
Centre

Resettlement Categories

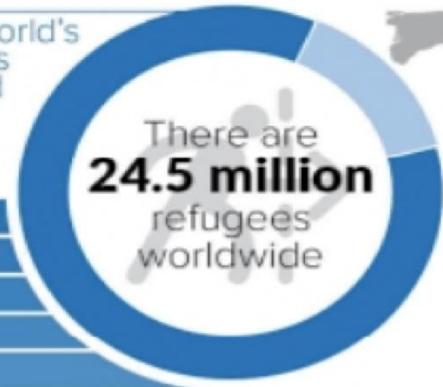
- Legal and/or Physical Protection Needs
- Survivors of Violence and/or Torture
 - Women and Girls at Risk
 - Family Reunification
- Children and Adolescents at Risk
 - Medical Needs
- Lack of Foreseeable Alternative Durable Solutions



85% of the world's refugees are being hosted in developing countries

TOP 5 HOSTS

Turkey	3.5M
Pakistan	1.4M
Uganda	1.4M
Lebanon	1M
Iran	980K



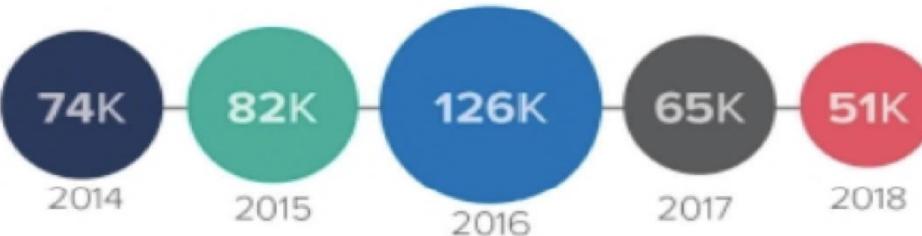
WHY IS REFUGEE RESETTLEMENT IMPORTANT?

Resettlement is a life-saving solution for the most vulnerable refugees in the world, and is also an important way to share responsibility and support the developing countries that host the majority of the world's refugees.

2018 GLOBAL RESETTLEMENT FIGURES AT A GLANCE

1 in every 500 of the world's refugees were resettled in 2018.

The number of global resettlement spaces have decreased sharply in recent years:



UNHCR estimates that **5%** of the world's refugees may need resettlement.

In 2018, **27** countries around the world accepted refugees for resettlement from almost **65** different countries of origin.

Top countries of origin for refugees resettled globally:

- 1 Dem. Rep. Congo
- 2 Myanmar
- 3 Syria



UNHCR

The UN Refugee Agency

Global Learning and Development Centre

Complementary Pathways

- Humanitarian admission programmes
- Education programmes
- Labour mobility schemes
- Family reunification
- Private/community sponsorship
- Humanitarian visas



New York Declaration for Refugees and Migrants

- 2016: 193 UN Member States
- Commitments of States to consolidate international refugee protection:
 - **Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF)**
 - Global Compact on Refugees (GCR) – December 2018
 - **Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)**



Global
Learning and
Development
Centre

Global Compact on Refugees: Objectives

- Ease pressures on host countries
- Build self-reliance of refugees
- Expand access to resettlement and other complementary pathways
- Support conditions that enable refugees to return in safety and dignity



UNHCR

The UN Refugee Agency

Global
Learning and
Development
Centre

Global Refugee Forum

17-18 December, 2019 – Geneva, Switzerland

- 1st forum
- Announcements of pledges & contributions
- Sharing of good practices, experiences and lessons learned

Website:

<https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html>



Global
Learning and
Development
Centre



Key Messages

- ▶ Solusi yang digunakan dari pilihan durable solution harus diterapkan secara case by case
- ▶ International protection ditawarkan negara terhadap warga negara asing dikarenakan HAM mereka terancam atau terlanggar di negara asalnya dan mereka tidak dapat mendapatkan perlindungan.
- ▶ International Protection bersifat sementara. Durable solution merupakan solusi yang ditawarkan agar setiap individual mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi
- ▶ Indonesia harus menentukan dan memposisikan diri dalam proses penanganan pengungsi di Indonesia agar dapat lebih berkontribusi dalam penyelesaian masalah pengungsi.